

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Saat ini akuntansi sektor publik telah mengalami perkembangan yang sangat pesat sehingga masyarakat menaruh perhatian yang lebih besar terhadap praktik akuntansi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah, perusahaan milik negara/daerah, dan berbagai organisasi publik lainnya dibandingkan pada saat dahulu. Dalam perkembangannya yang kian pesat kini organisasi sektor publik menghadapi tuntutan dilakukannya transparansi dan akuntabilitas dari masyarakat baik di pusat maupun daerah. Badjuri dan Trihapsari (2004) dalam Sukmaningrum (2012) mengatakan bahwa akuntabilitas dan transparansi dimaksudkan untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan pemerintah yang dilakukan aparatur dapat berjalan dengan baik.

Menurut Mardiasmo (2009) akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Sedangkan transparansi sebagai prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yakni informasi tentang kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai (Krina, 2003).

Laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah daerah sekarang ini masih banyak yang belum berkualitas serta belum dapat dikatakan baik dan benar. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan daerah kurang dapat dipahami oleh pihak yang berkepentingan. Aparatur pemerintah daerah belum berhasil menyusun laporan yang mengandung karakteristik kualitatif sehingga nantinya informasi yang ada di dalam laporan keuangan dapat digunakan oleh para pemakai sebagai dasar untuk pengambilan keputusan ekonomi. Ternyata kondisi sekarang pada pemerintah daerah di Indonesia masih banyak terdapat permasalahan-permasalahan dan penyimpangan-penyimpangan yang ditemukan di dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Banyak fenomena yang menunjukkan bahwa laporan keuangan daerah belum berkualitas, berikut berita tentang penyimpangan di dalam laporan keuangan daerah dan hasil audit dari BPK:

a. Berita dari website jnn.com yaitu:

Berita online tersebut menyampaikan bahwa BPK mengungkap kerugian negara sebesar 76 miliar rupiah di Jawa Timur. Temuan tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan dari 39 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) provinsi dan kabupaten/kota. Jumlah temuan selama setengah tahun yang dikatakan oleh Novian Herudwijanto, Kepala BPK perwakilan Jatim sebanyak 611 kasus dengan catatan terdapat 1.333 poin yang berpotensi terjadi penyimpangan. Dari 1.333 poin tersebut BPK telah memeriksa sebanyak 472 poin dengan nilai Rp 50,69 miliar. Lalu 700 poin dengan nilai

Rp 24,14 miliar sedang dalam proses dan tindak lanjut serta yang belum ditindak lanjuti sebanyak 161 poin dengan nilai Rp1,29 miliar.

Untuk proses pemeriksaan adanya penyimpangan yang sudah dan masih berlangsung yaitu kasus penerimaan & pengeluaran dana bantan parpol, pemeriksaan atas manajemen aset Pemkab Blitar, Jamkesmas dan dana desa. Serta yang masih berlangsung yaitu pemeriksaan atas belanja infrastruktur di 8 Pemda meliputi wilayah Surabaya, Gresik, Tuban, Bojonegoro, Kediri, Tulungagung, Probolinggo dan Pasuruan. Novian mengatakan pihak BPK sedang gencar melakukan sosialisasi terhadap penggunaan dana desa yang berpotensi terjadi penyimpangan supaya penggunaan dana harus tepat sasaran.

b. Berita dari website okezone.com yaitu:

Berita online tersebut menyampaikan catatan BPK selama IHPS 1 tahun 2016 untuk Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah di seluruh Indonesia. BPK menerbitkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I 2016 merupakan ringkasan dari 696 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang terdiri atas, 116 pada pemerintah pusat, 551 pada pemerintah daerah dan 29 pada BUMN dan badan lainnya. Ketua BPK Harry Azhar Azis menyimpulkan bahwa yang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas 385 laporan keuangan atau 60%, tidak termasuk laporan keuangan BPK yang diperiksa oleh KAP (Kantor Akuntan Publik) yang memperoleh opini WTP. Artinya terdapat 40% laporan keuangan yang tidak memperoleh opini WTP.

Selain itu BPK juga mengungkapkan 10.198 temuan yang memuat 15.568 permasalahan. Sebanyak 49% ada pada kelemahan sistem pengendalian internal dan 51% ada pada ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan senilai 44,68 triliun. Dari permasalahan ketidakpatuhan tersebut, sebanyak 60% berdampak finansial senilai 30,62 triliun yang terdiri dari 66% mengakibatkan kerugian negara senilai 1,92 triliun; 9% mengakibatkan potensi kerugian negara senilai 1,67 triliun; dan 25% mengakibatkan kekurangan penerimaan senilai 27,03 triliun rupiah. “Atas permasalahan ketidakpatuhan yang berdampak finansial selama proses pemeriksaan, entitas telah menindaklanjuti dengan menyerahkan aset atau menyetor ke kas negara senilai 442,24 miliar rupiah,” kata Harry.

Laporan keuangan yang baik dan benar serta berkualitas tidak dapat lepas dari pengaruh kompetensi sumber daya manusia dalam memahami akuntansi pemerintahan, keuangan daerah bahkan organisasional tentang pemerintahan. Masih terbatasnya aparatur di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berlatar belakang pendidikan sesuai dengan kompetensinya menjadikan kurangnya pemahaman dalam menyusun laporan keuangan yang baik dan benar. Minimnya kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang menjadikan informasi dalam laporan keuangan jauh dari kata baik dan benar serta masih banyak mengandung kesalahan. Sehingga laporan keuangan yang dihasilkan oleh aparatur pemerintah daerah tersebut kurang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai laporan keuangan dalam setiap pengambilan keputusan ekonomi.

Selain kompetensi sumber daya manusia, faktor lain yang memengaruhi kualitas laporan keuangan adalah pemanfaatan teknologi informasi. Di zaman sekarang teknologi sangat penting dalam membantu mempercepat segala proses yang nantinya pengeluarannya lebih cepat dan lebih menghemat waktu dan biaya. Dalam kegiatan pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah dituntut dan diharapkan dapat menyediakan informasi akuntansi dalam laporan keuangan secara tepat waktu dan akurat. Minimnya aparatur yang ada di pemerintah daerah dalam pengaplikasian teknologi informasi berdampak pada kualitas laporan keuangan yang nantinya akan digunakan oleh beberapa pihak yang berkepentingan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan (Nurillah, 2014).

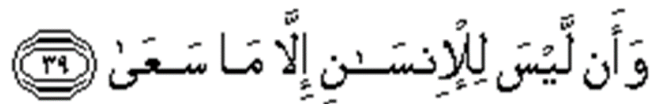
Hal lain yang memengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah pemahaman penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berdasarkan standar akuntansi pemerintah adalah bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan keandalan pengelolaan keuangan pemerintah melalui penyusunan dan pengembangan standar akuntansi pemerintah yang tujuannya agar laporan keuangan lebih accountable dan memiliki kualitas yang tinggi. Aparatur pemerintah daerah dituntut untuk memahami Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) dengan benar demi terwujudnya akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan pemerintah daerah. SAKD yaitu serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer (Permendagri Nomor 59 Tahun 2007).

Padahal tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan ekonomis (Ankarath dkk., 2012). Sedangkan menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK, 2004:12) yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI, 2002), tujuan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan atau instansi pemerintahan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai laporan keuangan dalam setiap pengambilan keputusan ekonomi. Sangatlah bermanfaat dan berguna informasi yang ada di dalam laporan keuangan dipahami oleh para pengambil keputusan. Segala informasi yang ada di laporan keuangan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jika tidak maka akan mengakibatkan kerugian daerah dan lain-lain. Oleh karena itu pemerintah daerah wajib memperhatikan dengan cermat informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan pengambilan keputusan, perencanaan, dan pengendalian.

Dengan sedikit penjelasan di atas laporan keuangan harus benar-benar disusun dengan baik dan benar. Aparatur pemerintah daerah harus berusaha untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan dengan sungguh-sungguh agar laporan keuangan tersebut dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi para penggunanya. Hal tersebut menjelaskan bahwa usaha adalah hal yang sangat penting dalam segala aktivitas untuk mencapai suatu tujuan. Terdapat

sebuah ayat di dalam Al-Quran yang telah menjelaskan tentang perintah untuk berusaha, Allah SWT berfirman:



Artinya: “Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya”. (Qs. An-Najm:39).

Dengan adanya fenomena-fenomena tersebut yang menyatakan bahwa laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah masih terdapat kekurangan, hal itu menunjukkan kapasitas sumber daya manusia di instansi pemerintahan kurang berkompeten. Ketidaktahuan sumber daya manusia di pemerintah daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi sangatlah berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang disusun dengan standar yang ditetapkan pemerintah. Berdasarkan fenomena-fenomena di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah pusat/daerah masih belum dapat dikatakan memenuhi karakteristik kualitatif. Mengingat bahwa karakteristik tersebut sangat berguna bagi para pengambil keputusan, maka dari itu penulis tertarik melakukan penelitian ini dengan judul **“Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sleman dan Bantul)”**. Penelitian ini adalah penelitian replikasi dari Albab (2015) dengan judul “Faktor-faktor yang Memengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Satuan

Kerja Perangkat Daerah”. Faktor-faktor dalam penelitian yang dilakukan oleh Albab yaitu Kompetensi SDM, Penerapan SAP, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada perubahan variable independen menjadi variabel moderasi yaitu Kompetensi SDM dan adanya pengurangan variabel independen yang sebelumnya ada 4 menjadi hanya 3 yaitu Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dapat diidentifikasi beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Apakah pemahaman SAKD berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan SKPD?
2. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan SKPD?
3. Apakah kompetensi SDM berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan SKPD?
4. Apakah kompetensi SDM berpengaruh positif terhadap hubungan antara pemahaman SAKD dengan kualitas laporan keuangan SKPD?
5. Apakah kompetensi SDM berpengaruh positif terhadap hubungan antara pemanfaatan teknologi informasi dengan kualitas laporan keuangan SKPD?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki beberapa tujuan yaitu sebagai berikut:

1. Memberikan bukti dan menganalisis apakah pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan SKPD.
2. Memberikan bukti dan menganalisis apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan SKPD.
3. Memberikan bukti dan menganalisis apakah kompetensi SDM berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan SKPD.
4. Memberikan bukti dan menganalisis apakah kompetensi SDM berpengaruh positif terhadap hubungan antara pemahaman SAKD dengan kualitas laporan keuangan SKPD.
5. Memberikan bukti dan menganalisis apakah kompetensi SDM berpengaruh positif terhadap hubungan antara pemanfaatan teknologi informasi dengan kualitas laporan keuangan SKPD.

D. Manfaat Penelitian

Di dalam setiap penelitian pasti memunculkan manfaat yang positif bagi semua pihak. Adapun manfaat penelitian ini antara lain yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan agar dapat bermanfaat sebagai sumber informasi bagi pemerintah daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah agar lebih maksimal dalam menyajikan laporan keuangan yang berkualitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan baik secara teori maupun praktik terkait dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2. Manfaat Teoritis

Manfaat bagi akademik, penelitian ini diharapkan mampu menjadi tambahan informasi bagi mahasiswa dalam pemahaman tentang akuntansi sektor publik dan dapat membantu untuk mempermudah mahasiswa membuat penelitian-penelitian selanjutnya.